

Kerangka Acuan Kerja
Workshop Replikasi Inovasi Pelayanan Peradilan pada
Pengadilan Percontohan Tahap II

Latar Belakang

a. Dasar Hukum

- Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik
- Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik
- Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2009 tentang Biaya Proses Penyelesaian Perkara dan Pengelolaannya pada Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang Berada Di Bawahnya.
- Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 026/KMA/SK/II/2012 tentang Standar Pelayanan Peradilan.
- Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 1-144/KMA/SK/II/2011 tentang Pedoman Pelayanan Informasi di Pengadilan.
- Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 4 Tahun 2012 tentang Perekaman Proses Persidangan
- Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 6 Tahun 2014 tentang Penanganan Bantuan Panggilan/Pemberitahuan.
- Surat Keputusan Ketua Tim Pengarah Kompetisi Inovasi Mahkamah Agung Nomor 009/KTP/SK/XI/2015 tentang Hasil Penilaian Tahap Akhir Kompetisi Inovasi Pelayanan Publik Peradilan 2015
- Surat Ketua Kamar Pembinaan Mahkamah Agung RI Nomor 077/TA-A2/MA/VI/2016 tanggal 24 Juni 2016 perihal Pengadilan Percontohan dalam rangka Implementasi Inovasi Pelayanan Peradilan
- SK Ketua Pengadilan tentang Panjar Biaya Perkara pada Pengadilan.
- Rencana Kerja Implementasi Inovasi Pelayanan Peradilan
- Laporan Kegiatan Pengembangan Inovasi Pelayanan Peradilan di Balitbang Diklat Kumdil, 22 s/d 27 Agustus 2016
- Laporan Kegiatan Workshop Replikasi Inovasi Pelayanan Peradilan pada 15 Pengadilan Percontohan pada tanggal 20 sd 22 Oktober 2016 di Balitbang Diklat Kumdil, Megamendung Bogor.
- Hasil Evaluasi Implementasi Replikasi ATR dan E-SKUM pada 15 Pengadilan Percontohan
- Laporan Tahunan Mahkamah Agung Tahun 2016

b. Gambaran Umum

Sejalan dengan amanat Pasal 4 ayat (2) Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, bahwa "*Pengadilan membantu pencari keadilan dan berusaha mengatasi segala hambatan dan rintangan untuk dapat tercapainya peradilan yang sederhana, cepat, dan biaya ringan*", Mahkamah Agung RI telah menyelenggarakan Kompetisi inovasi pelayanan peradilan, Workshop Penyusunan Rencana Kerja Pengembangan dan Replikasi inovasi terbaik dan pengembangan inovasi terpilih sebelum direplikasi ke Pengadilan Percontohan.

Pengembangan Inovasi atas E-SKUM dan ATR dilakukan di Balitbang Diklat Kumdil dari tanggal 22 s/d 27 Agustus 2016, dengan peserta dari Inovator PN Pekanbaru dan PA Kepanjen, Perwakilan Dirjen Badilum, Dirjen Badilag, Dirjen Badimiltun, Biro Hukum dan Humas, Biro Perencanaan dan Organisasi dan Asistensi Pembaruan. Selama 5 hari kerja inovator dibantu oleh tim IT Biro Hukum dan Humas dan Tim Biro Perencanaan serta Tim asistensi Pembaruan, membahas penyempurnaan aplikasi E-SKUM menjadi simulator di website pengadilan dan penyempurnaan ATR agar lebih aplikatif dan user friendly. Selain pengembangan aplikasi yang menghasilkan installer, disusun juga user manual dan rancangan kebutuhan sarpras pendukung.

Selanjutnya setelah dilakukan pengembangan atas e-SKUM dan ATR, pada tanggal 20 sd 22 Oktober 2016, telah dilakukan workshop replikasi pada 15 pengadilan percontohan sesuai dengan

Surat Ketua Kamar Pembinaan No. 077/TA-A2/MA/VI/2016 tanggal 24 Juni 2016 perihal Pengadilan Percontohan dalam rangka Implementasi Inovasi Pelayanan Peradilan, yaitu sebagai berikut :

- | | |
|---------------------------------|-----------------------------------|
| 1. Pengadilan Negeri Pekanbaru | 9. Pengadilan Agama Indramayu |
| 2. Pengadilan Negeri Depok | 10. Mahkamah Syariah Banda Aceh |
| 3. Pengadilan Negeri Cibinong | 11. Pengadilan TUN Jakarta |
| 4. Pengadilan Negeri Jember | 12. Pengadilan TUN Serang |
| 5. Pengadilan Negeri Purwokerto | 13. Pengadilan TUN Tanjung Pinang |
| 6. Pengadilan Agama Kab. Malang | 14. Pengadilan TUN Manado |
| 7. Pengadilan Agama Tenggamus | 15. Pengadilan TUN Surabaya |
| 8. Pengadilan Agama Mataram | |

Mahkamah Agung berharap bahwa replikasi inovasi pelayanan peradilan tidak berhenti pada 15 pengadilan percontohan ini saja tetapi dilanjutkan pada seluruh pengadilan di 4 lingkungan peradilan.

Selanjutnya pada akhir tahun anggaran 2016, Biro Perencanaan dengan meminta usulan dari Dirjen masing-masing lingkungan peradilan untuk menunjuk pengadilan percontohan (sebagai reward atas sertifikasi akreditasi, ISO dll), merencanakan untuk melakukan replikasi lanjutan pada 100 pengadilan percontohan tahap II, dimana kebutuhan sarana dan prasarana pada 100 pengadilan tersebut telah dialokasikan pada DIPA masing-masing pengadilan. Daftar 100 pengadilan percontohan telah tercantum dalam Laporan Tahunan Mahkamah Agung Tahun 2016 sebagai berikut :

Peradilan Umum :

- | | |
|------------------------------------|--------------------------------------|
| 1. Pengadilan Negeri Jakarta Barat | 22. Pengadilan Negeri Rengat |
| 2. Pengadilan Negeri Surakarta | 23. Pengadilan Negeri Mataram |
| 3. Pengadilan Negeri Pati | 24. Pengadilan Negeri Praya |
| 4. Pengadilan Negeri Magelang | 25. Pengadilan Negeri Sumbawa Besar |
| 5. Pengadilan Negeri Kendal | 26. Pengadilan Negeri Denpasar |
| 6. Pengadilan Negeri Klaten | 27. Pengadilan Negeri Bangli |
| 7. Pengadilan Negeri Blora | 28. Pengadilan Negeri Stabat |
| 8. Pengadilan Negeri Rembang | 29. Pengadilan Negeri Rantau Prapat |
| 9. Pengadilan Negeri Salatiga | 30. Pengadilan Negeri Metro |
| 10. Pengadilan Negeri Mungkid | 31. Pengadilan Negeri Tanjung Karang |
| 11. Pengadilan Negeri Temanggung | 32. Pengadilan Negeri Sinjai |
| 12. Pengadilan Negeri Banjarnegara | 33. Pengadilan Negeri Palopo |
| 13. Pengadilan Negeri Bekasi | 34. Pengadilan Negeri Tilamuta |
| 14. Pengadilan Negeri Bandung | 35. Pengadilan Negeri Sengeti |
| 15. Pengadilan Negeri Cibinong | 36. Pengadilan Negeri Batulicin |
| 16. Pengadilan Negeri Malang | 37. Pengadilan Negeri Kuala Kapuas |
| 17. Pengadilan Negeri Kepanjen | 38. Pengadilan Negeri Tenggarong |
| 18. Pengadilan Negeri Kediri | 39. Pengadilan Negeri Bontang |
| 19. Pengadilan Negeri Kab. Kediri | 40. Pengadilan Negeri Tual |
| 20. Pengadilan Negeri Gresik | 41. Pengadilan Negeri Surabaya |
| 21. Pengadilan Negeri Pekanbaru | 42. Pengadilan Negeri Jakarta Pusat |

Peradilan Agama :

- | | |
|-------------------------------------|--------------------------------------|
| 1. Pengadilan Agama Surabaya | 21. Pengadilan Agama Palu |
| 2. Pengadilan Agama Semarang | 22. Pengadilan Agama Kendari |
| 3. Pengadilan Agama Bandung | 23. Pengadilan Agama Ambon |
| 4. Pengadilan Agama Yogyakarta | 24. Pengadilan Agama Ternate |
| 5. Pengadilan Agama Lampung | 25. Pengadilan Agama Papua |
| 6. Pengadilan Agama Bengkulu | 26. Pengadilan Agama Serang |
| 7. Pengadilan Agama Jambi | 27. Pengadilan Agama Gorontalo |
| 8. Pengadilan Agama Palembang | 28. Pengadilan Agama Jakarta Pusat |
| 9. Pengadilan Agama Padang | 29. Pengadilan Agama Jakarta Selatan |
| 10. Pengadilan Agama Pekanbaru | 30. Pengadilan Agama Jakarta Barat |
| 11. Mahkamah Syari'ah Lhok Sukhon | 31. Pengadilan Agama Jakarta Utara |
| 12. Pengadilan Agama Pangkal Pinang | 32. Pengadilan Agama Jakarta Timur |
| 13. Pengadilan Agama Kupang | 33. Pengadilan Agama Medan |
| 14. Pengadilan Agama Praya | 34. Pengadilan Agama Purbalingga |
| 15. Pengadilan Agama Banjarmasin | 35. Pengadilan Agama Ciamis |
| 16. Pengadilan Agama Pontianak | 36. Pengadilan Agama Tulungagung |
| 17. Pengadilan Agama Palangkaraya | 37. Pengadilan Agama Jember |
| 18. Pengadilan Agama Samarinda | 38. Pengadilan Agama Tigaraksa |
| 19. Pengadilan Agama Makasar | 39. Pengadilan Agama Denpasar |
| 20. Pengadilan Agama Manado | 40. Pengadilan Agama Karawang |

Peradilan Tata Usaha Negara

1. PTUN Palembang
2. PTUN Banda Aceh
3. PTUN Bengkulu
4. PTUN Bandung
5. PTUN Samarinda
6. PTUN Palangkaraya
7. PTUN Denpasar
8. PTUN Mataram
9. PTUN Makassar
10. PTUN Jayapura

Peradilan Militer

1. Pengadilan Militer Tinggi Medan
2. Pengadilan Militer Tinggi Jakarta
3. Pengadilan Militer Tinggi Surabaya
4. Pengadilan Militer Banda Aceh
5. Pengadilan Militer Medan
6. Pengadilan Militer Palembang
7. Pengadilan Militer Jakarta
8. Pengadilan Militer Bandung
9. Pengadilan Militer Surabaya
10. Pengadilan Militer Madiun

Sebelum dilakukan Replikasi pada 100 pengadilan percontohan tahap 2 di atas, perlu untuk dilakukan evaluasi atas hasil implementasi pada 15 pengadilan percontohan 1 sebagai masukan/feed back penyempurnaan aplikasi baik ESKUM maupun ATR.

Evaluasi dan Rencana aksi tindak lanjut penyempurnaan ATR dan ESKUM telah dilakukan pada tanggal 15 Mei 2017 di Ruang Rapat Lt 12 dan 13 Juni 2017 di Ruang Rapat Mudjono. Berdasarkan hasil kesepakatan, penyempurnaan ATR dilaksanakan oleh Tim dari Pengadilan Negeri Kendal dan penyempurnaan ESKUM dilakukan oleh Tim dari PN Pekanbaru dengan

dibantu oleh Juwan Jusliawan Al Fauz, SE melalui rapat koordinasi dan perumusan bersama Tim dari Dirjen Badimiltun.

Setelah dilaksanakan penyempurnaan aplikasi baik ESKUM dan ATR berikut installer dan user manual, kami bermaksud menyelenggarakan replikasi inovasi pelayanan peradilan pada 100 pengadilan yang telah ditetapkan.

Maksud dan Tujuan

Maksud dari kegiatan ini adalah menindaklanjuti kegiatan Kompetisi Inovasi Pelayanan Peradilan dan Replikasi I pada 15 pengadilan percontohan melalui Workshop Replikasi ke 100 pengadilan percontohan ke 2 agar dapat memberikan manfaat sebesar-besarnya kepada masyarakat.

Tujuan kegiatan ini adalah untuk:

1. terlaksananya rencana kerja pengembangan inovasi pelayanan peradilan dan
2. terlaksananya replikasi inovasi pelayanan peradilan
3. transparansi panjar biaya perkara
4. kemudahan bagi masyarakat memperoleh akses keadilan
5. Akurasi dan kemudahan pengusulan berita acara sidang
6. meningkatkan kualitas pelayanan peradilan melalui implementasi inovasi pelayanan peradilan

Tahapan Pelaksanaan Kegiatan

Tahapan kegiatan direncanakan dengan tahapan sebagai berikut:

1. Persiapan Kegiatan
 - a. Rapat Koordinasi sebagai bahan penyusunan KAK,
 - b. Penyusunan dan penetapan panitia pelaksana kegiatan serta rapat koordinasi pembagian kerja
 - c. Mempersiapkan kebutuhan anggaran kegiatan
 - d. Merumuskan model anjungan dan spesifikasi sarpras pendukung
 - e. Mencetak dan menggandakan Installer, User Manual dan Tool Monitoring
 - f. Menyiapkan draft SK, undangan dan surat menyurat lainnya
2. Pelaksanaan Kegiatan
 - a. Registrasi Peserta – Perlengkapan – Acara (jobdesk kepanitiaan)
 - b. Workshop Replikasi (rundown terlampir)
 - c. Penetapan personal Helpdesk dan sarana komunikasi pada Whatshap Group untuk konsultasi, diskusi dan money)
 - d. Membangun komitmen implementasi dan time schedule penyampaian laporan monitoring

Panitia dan Peserta Kegiatan

Untuk meningkatkan efektifitas implementasi ESKUM dan ATR, kepanitiaan dan pendampingan, selain dari Biro Perencanaan dan Organisasi juga melibatkan Tim IT Biro Hukum dan Humas, Inovator, Tim Asistensi Pembaruan dan Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum, Agama dan Militer TUN, sebagai berikut:

1. Ketua Kamar Pembinaan MA
2. Sekretaris MA RI
3. Kepala Badan Urusan Administrasi
4. Dirjen Badan Peradilan Umum
5. Dirjen Badan Peradilan Agama
6. Dirjen Badan Peradilan Militer dan TUN
7. Pejabat Es1 2
8. Inovator ESKUM dan ATR
9. Ketua 102 Pengadilan Percontohan
10. Operator IT 102 Pengadilan Percontohan

11. Kabag Perencanaan pada Dirjen Badilum, Badilag dan Badimiltun
12. Pokja Inovasi Pelayanan Peradilan
13. Asistensi Tim Pembaruan MA

Peserta adalah Ketua dan operator IT dari 102 Pengadilan Percontohan Tahap II. melibatkan selain mengundang Ketua Pengadilan dan Operator IT Pengadilan Percontohan, kegiatan ini akan melibatkan :

Tempat Pelaksanaan

Kegiatan ini akan dilaksanakan di Badan Litbang Diklat Megamendung-Bogor-Jawa Barat

Penerima Manfaat

1. Internal

- Para panitera, Hakim dan Pimpinan Pengadilan Tk Pertama
- Para panitera, Hakim dan Pimpinan Pengadilan Tk Banding
- Pokja Inovasi Pelayanan Peradilan
- Dirjen Badan Peradilan Umum
- Dirjen Badan Peradilan Agama
- Dirjen Badan Peradilan Militer dan TUN
- Badan Urusan Administrasi

2. External

- Masyarakat pencari keadilan

Jadwal Kegiatan

Kegiatan Pengembangan inovasi pelayanan peradilan akan dilaksanakan tanggal 09 s/d 11 Oktober 2017. Dengan rundown acara sebagai berikut:

(jadwal terlampir)

Kepala Biro Perencanaan dan Organisasi



Okke Apoye Pribadi